

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi sebanyak dua kali dalam kurun waktu dua dekade terakhir yaitu tahun 1998 dan tahun 2008. Krisis ekonomi ini telah memberikan dampak bagi seluruh sektor perekonomian di Indonesia baik skala usaha nasional, skala usaha besar, skala usaha menengah, skala usaha kecil, dan skala usaha mikro.

Sektor perekonomian yang tidak terpengaruh secara signifikan dan mampu bertahan dalam krisis ekonomi biasanya adalah usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro. Hal ini dikarenakan sektor usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro menjalankan usahanya tidak terlalu bergantung pada modal pinjaman atau modal dari luar serta mampu mandiri dalam mengelola usahanya. Walaupun meminjam dari bank, biasanya dengan suku bunga yang sangat ringan karena adanya subsidi dari pemerintah, bahkan terkadang dengan pinjaman tanpa bunga.

Meskipun usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro mampu bertahan dari krisis ekonomi yang terjadi akan tetapi di sisi yang lain pengelolaan keuangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro kurang baik dikarenakan rata-rata dapat dikatakan bahwa usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro tidak menerapkan pencatatan keuangan secara tepat sesuai dengan aturan yang berlaku umum yaitu standar akuntansi keuangan.

Rata-rata pengelolaan keuangan pada usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro hanya sebatas pencatatan uang masuk dan uang keluar. Selisih antara

uang masuk dan uang keluar akan dianggap sebagai laba atau keuntungan yang diperoleh dalam periode tersebut, padahal penentuan laba tidak seperti itu namun harus mengikuti aturan yang berlaku umum.

Pada umumnya pemilik usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro beranggapan bahwa penerapan pencatatan keuangan kurang perlu dengan alasan waktu yang kurang dan biaya yang cukup besar untuk melaksanakannya. Kebanyakan mereka hanya mengandalkan ingatan untuk mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional usaha mereka.

Dalam usaha pencapaian laba usaha terdapat proses-proses yang harus dilalui sejak transaksi usaha dilakukan sampai dengan proses perhitungan laba akhir periode atau laba bersih usaha. Proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila ada sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan pada usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki sistem pembukuan lengkap dalam pencatatan keuangannya.

Sistem pembukuan ini pada akhirnya akan menghasilkan suatu laporan keuangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro yang mencerminkan kinerja selama satu periode tertentu. Sistem pembukuan yang baik dapat juga membantu perusahaan dalam melakukan pengawasan sehingga bisa menghindari terjadinya penyelewengan atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan.

Untuk urusan ke luar misalnya dalam hal untuk meminjam uang di bank di mana saat ini setiap bank mengharuskan semua perusahaan dalam berbagai skala usahanya untuk menyampaikan laporan keuangan mereka sebagai salah satu syarat melakukan pinjaman dana di bank. Jelaslah di sini bahwa penerapan

pencatatan keuangan melalui sistem pembukuan yang lengkap sangat dibutuhkan oleh usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro.

Kota Tengah sebagai ibukota Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Salah satu bukti perkembangan tersebut adalah banyaknya usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai jenis usahanya termasuk usaha warnet (warung internet).

Usaha warnet merupakan salah satu usaha dengan skala usaha kecil dan usaha menengah sesuai dengan jumlah kekayaan bersih yang dimilikinya. Saat ini cukup banyak usaha warnet yang beroperasi di Kota Tengah. Usaha warnet ini memberikan pelayanan jasa internet dengan jam layanan yang beraneka ragam bahkan ada yang buka selama 24 jam.

Pendirian usaha warnet merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif masyarakat sehingga harus dikelola secara tepat. Berdirinya usaha warnet turut membantu dalam upaya untuk meminimalisir angka pengangguran yang ada di Kota Tengah karena dengan adanya usaha warnet ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa usaha warnet di Kota Tengah belum menerapkan pencatatan keuangan secara lengkap, artinya usaha warnet tersebut belum memiliki sistem pembukuan yang lengkap. Pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana hanya sebatas jumlah uang yang diterima dari pengguna jasa internet dan jumlah uang yang terpakai untuk biaya usaha warnet.

Pemilik usaha warnet tidak melakukan pencatatan secara rinci berapa jumlah uang masuk dan berapa jumlah uang keluar, artinya tidak ada pencatatan rinci tentang pendapatan dan biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan sehubungan dengan usaha warnet tersebut. Dengan demikian pemilik usaha warnet tidak dapat mengetahui besarnya laba bersih yang sebenarnya diperoleh.

Penentuan laba bersih usaha warnet kebanyakan hanya didasarkan pada sisa uang tunai yang ada di kasir (penjaga warnet) yang dihitung oleh pemilik usaha warnet pada saat warnet ditutup. Meskipun usaha warnet ini telah dijalankan bertahun-tahun namun tidak ada laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh pemilik usaha warnet.

Beberapa alasan yang dikemukakan adalah pemilik usaha warnet banyak yang kurang paham tentang sistem pembukuan yang lengkap dan kurang paham dalam menyusun laporan keuangan tahunan. Hal ini terjadi karena pemilik usaha warnet tidak mengerti tentang pentingnya pembukuan usaha yang lengkap sehingga hanya mengandalkan pencatatan keuangan yang sederhana saja. Padahal banyak manfaat yang diperoleh jika menerapkan pencatatan keuangan lengkap.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu penelitian skripsi dengan judul: **Studi Penerapan Pencatatan Keuangan Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) - Studi Kasus Pada Usaha Warnet Di Kota Tengah.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pencatatan keuangan yang telah dilaksanakan oleh usaha warnet di Kota Tengah?
2. Bagaimanakah penerapan pencatatan keuangan yang seharusnya menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pencatatan keuangan yang telah dilaksanakan oleh usaha warnet di Kota Tengah.
2. Untuk mengetahui penerapan pencatatan keuangan yang seharusnya menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai penerapan pencatatan keuangan yang seharusnya pada usaha warnet menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.
2. Manfaat bagi pemilik usaha warnet yaitu dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menerapkan pencatatan keuangan yang seharusnya menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.
3. Sebagai bahan referensi tambahan bagi penelitian yang sejenis.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terdapat di Kota Tengah jumlahnya cukup banyak dan beragam jenis usahanya, oleh karena itu dalam penelitian ini

fokus permasalahan dibatasi hanya pada penerapan pencatatan keuangan yang dilaksanakan oleh usaha warnet di Kota Tengah, sedangkan usaha kecil menengah jenis lainnya tidak dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan replikasi dari salah satu penelitian yang telah dilakukan oleh Irma Dianita (2011) dengan judul Studi Penerapan Pencatatan Keuangan Pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Pada UMK Pengrajin Sepatu dan Sandal Wanita di Wilayah Surabaya Utara dan Surabaya Barat). Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan nanti adalah dari segi lokasi penelitian dan objek usaha kecil yang akan diteliti. Peneliti terdahulu objeknya UMK pengrajin sepatu dan sandal, sedangkan penulis mengambil objek tentang usaha warnet.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori atau konsep yang terkait dengan topik penelitian dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan pembahasan yang telah dibuat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Sistem Pembukuan

Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan. Transaksi meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Pembukuan berbeda dengan akuntansi. Proses akuntansi biasanya dilakukan oleh seorang akuntan. Akuntan membuat laporan dari transaksi keuangan tercatat yang ditulis oleh ahli pembukuan. Terdapat beberapa metode umum pembukuan yaitu sistem pembukuan masukan-tunggal dan pembukuan berpasangan. Setiap proses yang melibatkan pencatatan transaksi keuangan adalah proses pembukuan (id.wikipedia.org/wiki/pembukuan).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh id.wikipedia.org/wiki/pembukuan, ada dua sistem pembukuan yang umum digunakan dalam dunia usaha dan organisasi lainnya yaitu sistem pembukuan masukan-tunggal dan pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan masukan-tunggal hanya menggunakan akun pendapatan dan pengeluaran, dicatat terutama di dalam jurnal pendapatan dan pengeluaran. Sistem pembukuan masukan-tunggal cocok digunakan untuk usaha mikro dan kecil. Sistem pembukuan berpasangan memerlukan pengeposan (pencatatan) tiap-tiap transaksi dua kali, menggunakan debit dan kredit.

Sistem pembukuan masukan-tunggal atau sistem pembukuan tunggal (*single entry*) adalah sistem pencatatan akuntansi yang dalam hal ini setiap

kejadian transaksi akuntansi hanya dicatat satu kali. Sedangkan sistem pembukuan berpasangan (*double entry*) adalah sistem pencatatan akuntansi yang dalam hal ini setiap kejadian transaksi akuntansi akan dicatat duakali, artinya pada setiap transaksi terdapat dua rekening atau akun yang akan saling dipengaruhi (id.wikipedia.org/wiki/pembukuan).

Dalam sistem pembukuan berpasangan dikenal istilah debit dan kredit. Setiap rekening yang yang didebit diikuti dengan rekening lain yang dikredit, demikian pula sebaliknya. Jumlah sisi debit dan kredit harus sama, jika tidak maka pencatatannya menjadi salah, akibatnya neraca yang dihasilkan menjadi tidak seimbang atau tidak sama jumlahnya antara sisi aktiva dan sisi passiva (id.wikipedia.org/wiki/pembukuan).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Beberapa pedoman pokok yang mengatur mengenai pembukuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) terdiri atas:

1. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus menggunakan itikad baik dan mencerminkan keadaan kegiatan usaha yang sesungguhnya.

2. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian.
3. Pembukuan atau pencatatan harus menggunakan Bahasa Indonesia dan mata uang rupiah.
4. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan metode basis akrual atau metode basis kas.
5. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan atau diarsipkan.

2.2 Tujuan dan Kegunaan Sistem Pembukuan

Sistem pembukuan menjadi sarana vital dalam suatu perusahaan karena dengan sistem pembukuan, perusahaan bisa mengkalkulasi, mengontrol dan mengatur keseluruhan transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Pengimplementasian sistem pembukuan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.
2. Mendukung operasi rutin harian perusahaan.
3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.
4. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
5. Melindungi aset perusahaan.

Beberapa kegunaan sistem pembukuan bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Alat kontrol keuangan usaha.
2. Alat pengambilan keputusan.
3. Alat penghitungan pajak.
4. Sebagai informasi penting dalam mengadakan relasi dengan pihak lain.

Penyusunan pembukuan yang paling mendasar dan wajib dimiliki oleh perusahaan adalah laporan rugi laba, neraca, dan laporan arus kas, yang mana dalam dunia bisnis dikenal dengan sebutan laporan keuangan. Selain itu, ada juga laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan, yang juga mesti dibuat oleh perusahaan.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembukuan sebagai berikut:

1. Pembukuan harus meliputi seluruh kegiatan usaha.
2. Pembukuan harus dilakukan secara teratur dan terinci.
3. Pembukuan harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran dan keabsahannya.
4. Pembukuan harus ditutup dengan membuat laporan keuangan.

2.3 Laporan Keuangan

Secara umum dapat dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan tentang perkembangan perusahaan selama satu periode tertentu. Dari laporan keuangan ini maka perusahaan dapat melihat kinerja yang telah dilakukan selama satu periode tersebut.

Beberapa definisi laporan keuangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. *Financial statement* (laporan keuangan) adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, baik di dalam maupun di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba, dan laporan perubahan posisi keuangan (Aliminsyah dan Padji, 2005).

2. Menurut Winarni dan Sugiyarso (2006), laporan keuangan merupakan daftar ringkasan akhir transaksi keuangan organisasi yang menunjukkan semua kegiatan operasional perusahaan dan akibatnya selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca (balance sheet), laporan laba-rugi (income statements), laporan perubahan posisi keuangan (laporan arus kas atau arus dana), dan catatan atas laporan keuangan, sebagai bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Darsono dan Ashari (2005) pembuatan laporan keuangan harus mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU), yang merupakan suatu kebiasaan atau aturan yang baik untuk menyusun laporan keuangan. Di Indonesia, prinsip akuntansi yang berlaku umum meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
3. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
4. Buletin Teknis.
5. Peraturan Pemerintah.
6. Pedoman atau Praktek Akuntansi Industri.
7. Kesimpulan Riset Akuntansi.
8. Praktek Konvensi atau Kebiasaan Pelaporan yang Sehat.
9. Buku Teks Ajar, Artikel atau Pendapat Para Ahli.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, laporan keuangan yang lengkap terdiri atas:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (assets), utang (liabilities), dan modal sendiri (*owners equity*) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun (Jumingan, 2006).

Laporan laba rugi (*income statement*) adalah suatu ikhtisar yang melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu dengan menggunakan konsep penandingan (*matching concept*). Laporan laba rugi memberi informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan yang diukur dengan laba yang diperoleh selama periode tertentu (Maria, 2007).

Tujuan laporan arus kas (*statement of cash flow*) adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai kas masuk dan kas keluar suatu entitas pada periode waktu tertentu serta memberikan informasi dasar mengenai aktivitas operasi, investasi, dan keuangan. Dalam laporan arus kas, penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan dalam 3 kategori utama yaitu: kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan keuangan (Muljo, 2007).

Laporan perubahan ekuitas (*statement of change of equity*) menjelaskan perubahan modal, laba ditahan, dan agio/disagio. Laporan ini menggambarkan saldo dan perubahan hak si pemilik yang melekat pada perusahaan. PSAK nomor 1 menyebutkan bahwa perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas

sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan laba atau rugi bersih periode bersangkutan, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, serta rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio saham, dan cadangan pada awal dan akhir periode.

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan umum tentang perusahaan, kebijakan akuntansi yang dianut, dan penjelasan tiap-tiap akun neraca dan laba-rugi. SAK mengatur bagaimana akun harus disajikan, penjelasan apa saja yang harus ada, bagaimana mengukurnya, kapan perusahaan mengakui aktiva, utang, pendapatan, dan biaya. Untuk perusahaan atau industri tertentu diatur khusus, seperti: bank, koperasi, dana pensiun, dan sebagainya.

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengaturan mengenai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan kepada:
 - a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan; dan
 - i. kesatuan ekonomi nasional.
5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Beberapa definisi lain terkait dengan UMKM dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah

tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK-016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa serta jenis usaha perorangan lainnya.

2.5 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan beberapa kriteria mengenai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro yaitu:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil yaitu:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah yaitu:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.6 SAK-ETAP

Salah satu terobosan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu pada bulan Mei 2009 mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK ETAP ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini atau sebelum 1 Januari 2011 juga diperkenankan.

Beberapa kriteria yang menentukan suatu entitas tergolong Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan

Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.

- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah:

- a. Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha
- b. Kreditur
- c. Lembaga Pemeringkat Kredit

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK-ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK-ETAP.

Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK ETAP pada tahun 2011, namun kemudian mendaftar menjadi perusahaan publik di tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali.

Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan.

Meskipun SAK ETAP telah diterbitkan, namun masih ada beberapa kelemahan. Diantaranya adalah tidak disinggung bagaimana UMKM harus menyusun laporan keuangan. Kelemahan UMKM dalam pembukuan terkadang membuat UMKM menghadapi kendala dalam pendanaan oleh bank (Martani, 2012).

Berikut ini akan disajikan beberapa pembahasan mengenai pencatatan (jurnal) sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku:

1. Pada saat perusahaan menerima pendapatan secara tunai, maka jurnalnya:

Kas	xxx	-
Pendapatan	-	xxx

2. Pada saat perusahaan melakukan pembayaran biaya, maka jurnalnya:

Biaya(jenis biaya)	xxx	-
Kas	-	xxx

3. Pada saat pelunasan utang usaha, maka jurnalnya:

Utang Usaha	xxx	-
Kas	-	xxx

4. Pada saat pengambilan pribadi oleh pemilik usaha, maka jurnalnya:

Prive	xxx	-
Kas	-	xxx

5. Pada saat pemilik menyetorkan uang tunai sebagai modal, maka jurnalnya:

Kas	xxx	-
Modal Usaha	-	xxx

6. Pada saat penerimaan piutang usaha, maka jurnalnya:

Kas	xxx	-
Piutang Usaha	-	xxx

2.7 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pembukuan yang dilakukan oleh UMKM yaitu:

1. Irma Dianita (2011) melakukan penelitian dengan judul Studi Penerapan Pencatatan Keuangan Pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Pada UMK Pengrajin Sepatu dan Sandal Wanita di Wilayah Surabaya Utara dan Surabaya Barat). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memerlukan interaksi antara peneliti dengan objek penelitian yang bersifat interaktif untuk memahami realitas objek. Teknik pertama yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap para informan. Teknik kedua digunakan observasi terhadap tindakan dalam penerapan sistem akuntansi. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dari analisis dapat disimpulkan, pemilik UMK sudah memahami pencatatan keuangan, walaupun tanpa ada catatan kegiatan usaha

secara tertulis dengan rapi. Tetapi kenyataannya pemilik UMK sudah bisa menggunakan informasi keuangan tersebut dalam melakukan perencanaan biaya dan pengambilan keputusan, artinya bahwa kegiatan UMK sudah menghasilkan produk akuntansi. Hal ini juga terbukti bahwa usaha UMK masih bisa bertahan sampai dengan saat ini.

2. Okky Permana Y (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Tropodo Waru Sidoarjo. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh latar belakang pendidikan, pengalaman, jenis usaha, dan skala usaha terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Sidoarjo. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kecil dan menengah yang tersebar di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo yaitu sebanyak 218 unit. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 69 orang pemilik UKM. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari perusahaan. Sedangkan analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan dari hasil penelitian maka diperoleh yaitu: (1) Variabel latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo. (2) Variabel pengalaman memimpin berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo. (3) Variabel jenis UKM tidak berpengaruh terhadap

penggunaan informasi akuntansi pada UKM di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo. (4) Variabel skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah usaha mikro kecil menengah berupa usaha warnet yang cukup banyak beroperasi di Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang telah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah dari objek yang akan diteliti dan ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menentukan bahwa populasinya adalah seluruh usaha kecil yang bergerak dalam bidang usaha warung internet (warnet) yang beroperasi di Kota Tengah dan jumlah usaha warnetnya sebanyak 7 unit usaha warnet.

Menurut pendapat Margono (2010), sampel adalah bagian dari populasi. Ada beberapa teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian skripsi ini, teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah teknik sampling secara probabilitas yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif.

Dalam teknik sampling secara probabilitas ini, salah satunya dapat dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak untuk dijadikan sampel. Beberapa pertimbangan khusus tersebut sebagai berikut:

1. Usaha Warnet sudah berjalan cukup lama yaitu lebih dari 1 tahun.
2. Usaha Warnet memiliki izin usaha yang jelas.
3. Usaha Warnet aktif melaksanakan usahanya (buka setiap hari).

Berdasarkan beberapa pertimbangan khusus di atas maka penulis menetapkan bahwa banyaknya unit usaha warnet yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian sebanyak 5 unit usaha warnet di Kota Tengah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun beberapa jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari perusahaan terkait dengan penerapan pencatatan keuangan yang diperoleh melalui tanya jawab atau wawancara dengan pemilik usaha warnet di Kota Tengah.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi berupa catatan keuangan sederhana yang dilakukan oleh pemilik usaha warnet di Kota Tengah misalnya pencatatan uang masuk (uang sewa warnet) dan pencatatan uang keluar (biaya usaha warnet). Data-data tersebut bersumber dari pemilik warnet yang beroperasi di Kota Tengah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari dua cara yaitu:

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pemilik warnet yang beroperasi di Kota Tengah terkait dengan penerapan pencatatan keuangan usaha warnet.

2. Dokumentasi

Yaitu dengan meminta data-data yang sudah jadi dari pemilik warnet yang beroperasi di Kota Tengah berupa pencatatan uang masuk (uang sewa warnet) dan pencatatan uang keluar (biaya usaha warnet) serta data lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan melakukan perbandingan antara teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian dengan penerapan dalam perusahaan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk dianalisis secara teliti kemudian dibuat kesimpulan.

3.7 Jadwal Penelitian

Penelitian memerlukan waktu yang cukup lama sejak pengajuan judul sampai dibuatnya laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Kegiatan penelitian skripsi secara umum terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan di mana dalam setiap tahap tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama. Supaya penelitian ini berjalan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka penulis menyusun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Rencana Penelitian

Tahap Penelitian	Uraian Kegiatan	Waktu
Penyusunan Proposal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan judul 2. Rencana pencarian data 3. Pembuatan proposal bab 1 sampai dengan bab 3 4. Revisi dengan pembimbing 	4 minggu
Ujian Seminar Proposal	Pelaksanaan ujian seminar proposal	1 minggu
Penyusunan Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan data penelitian 2. Perbaikan proposal bab 1 sampai dengan bab 3 3. Pembuatan skripsi bab 4 dan bab 5 4. Revisi dengan pembimbing 	10 minggu
Ujian Sidang Skripsi	Pelaksanaan ujian sidang skripsi	1 minggu
	Total Kebutuhan Waktu	16 minggu (4 bulan)